



**LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017**

*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
567364*



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai,



Chendy Tafakresnanto, MP
NIP. 19611222 199003 1001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Pendapatan

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja

B.2.1 Belanja Pegawai

B.2.2 Belanja Barang

B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.2.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.3 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

C.2.3 Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan



- C.2.7 Akumulasi Penyusutan
- C.3 Piutang Jangka Panjang
- C.4 Aset Lainnya
 - C.4.1 Aset Tak Berwujud
 - C.4.2 Aset Lain-lain
 - C.4.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- C.5 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga
- C.6 Ekuitas
 - C.6.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.10 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur yang terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017

sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai,



Chendy Tafakresnanto, MP
NIP. 19611222 199003 1001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.669.035.810,00 atau mencapai 239,82% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp695.943.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp40.593.240.854,00 atau mencapai 82,01% dari alokasi anggaran sebesar Rp49.495.711.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp455.413.554.935,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp9.563.951.567,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp445.843.756.493,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp5.846.875,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30.011.492,00 dan Rp455.383.543.443,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.365.227.728,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp173.684.875.688,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-172.319.647.960,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp138.005.798.846,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-34.313.849.114,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp449.265.711.204,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-34.313.849.114,00



kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-8,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp40.431.681.361,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp455.383.543.443,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERIODE 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	695.943.000,00	1.669.035.810,00	239,82	3.319.233.516,00
Jumlah Pendapatan		695.943.000,00	1.669.035.810,00	239,82	3.319.233.516,00
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	13.901.566.000,00	12.631.375.458,00	90,86	13.548.923.052,00
Belanja Barang	B.2.2	22.454.300.000,00	17.774.041.080,00	79,16	25.507.493.545,00
Belanja Modal	B.2.3	13.139.845.000,00	10.187.824.316,00	77,53	1.845.693.500,00
Jumlah Belanja		49.495.711.000,00	40.593.240.854,00	82,01	45.707.282.297,00

Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai,



Chendy Tafakresnanto, MP
NIP. 19611222 199003 1001



II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR

NERACA

Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		39.936.667,00	0,00
Piutang Bukan Pajak		469.196.330,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (Netto)		-234.598.165,00	0,00
Piutang Bukan Pajak (netto)		234.598.165,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.1	294.101.046,00	445.102.020,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.2	-147.050.523,00	-2.225.510,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (netto)	C.1.1	147.050.523,00	442.876.510,00
Persediaan	C.1.3	9.142.366.212,00	12.000.624.432,00
Jumlah Aset Lancar		9.563.951.567,00	12.443.500.942,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	417.759.133.000,00	417.759.133.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	38.115.846.767,00	34.702.687.940,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	35.758.623.970,00	23.959.469.052,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	2.287.644.280,00	1.856.943.780,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	358.734.083,00	358.734.083,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	1.359.030.000,00	4.953.300.000,00
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	-49.795.255.607,00	-46.943.375.131,00
Jumlah Aset Tetap		445.843.756.493,00	436.646.892.724,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	8.365.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2	0,00	313.970.135,00
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	-2.518.125,00	-105.267.597,00
Jumlah Aset Lainnya		5.846.875,00	214.817.538,00
Jumlah Aset		455.413.554.935,00	449.305.211.204,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	30.011.492,00	39.500.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.011.492,00	39.500.000,00
Jumlah Kewajiban		30.011.492,00	39.500.000,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.1	455.383.543.443,00	449.265.711.204,00
Jumlah Ekuitas		455.383.543.443,00	449.265.711.204,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		455.413.554.935,00	449.305.211.204,00



Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai,



Chendy Tafakresnanto, MP

NIP. 19611222 199003 1001



III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR

LAPORAN OPERASIONAL

Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.365.227.728,00	2.530.981.962,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.365.227.728,00	2.530.981.962,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12.631.375.458,00	13.548.923.052,00
Beban Persediaan	D.3	142.019.483.354,00	138.271.540.735,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.801.678.260,00	6.275.025.773,00
Beban Pemeliharaan	D.5	1.046.122.597,00	1.293.360.032,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.747.412.235,00	6.908.956.424,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	5.561.440.000,00	5.960.082.085,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2.497.940.606,00	7.985.080.118,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	379.423.178,00	2.225.510,00
JUMLAH BEBAN		173.684.875.688,00	180.245.193.729,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-172.319.647.960,00	-177.714.211.767,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	138.005.798.846,00	133.305.916.175,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		138.005.798.846,00	133.305.916.175,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-34.313.849.114,00	-44.408.295.592,00

Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai,



Chendy Tafakresnanto, MP
NIP. 19611222 199003 1001



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Per 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	449.265.711.204,00	447.882.994.654,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-34.313.849.114,00	-44.408.295.592,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-8,00	3.154.724.361,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	-8,00	3.154.724.361,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	40.431.681.361,00	42.636.287.781,00
EKUITAS AKHIR		455.383.543.443,00	449.265.711.204,00

Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai,



Chendy Tafakresnanto, MP
NIP. 19611222 199003 1001



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur

Visi

- BPTP Jawa Timur merupakan penghasil dan penyedia teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi dalam arti luas untuk menunjang pengembangan pertanian berwawasan agribisnis bagi Propinsi Jawa Timur. Untuk mewujudkan hal tersebut, visi BPTP Jawa Timur ke depan adalah: Institusi penghasil dan penyedia teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi Jawa Timur.

Misi

- Menghasilkan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang sesuai dengan ketersediaan sumberdaya
- Menyediakan, mendiseminasikan dan mempromosikan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil-hasil pertanian yang berwawasan lingkungan dan agribisnis
- Meningkatkan pendapatan keluarga tani dan kesempatan kerja produktif yang berkeadilan
- Menjalin kemitraan dengan stakeholders (instansi terkait, swasta, LSM dll.) untuk memberdayakan petani dalam mengelola usahatani
- Menumbuhkembangkan peran kelembagaan untuk memantapkan ketahanan pangan
- Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan pertanian daerah.

Tugas Pokok

- Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi bagi semua komoditas pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan teknologi yang bersifat terapan (siap pakai) dengan mempertimbangkan optimasi produksi serta pendapatan petani.



Fungsi

- Mengadakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi .
- Melakukan penelitian dan pengkajian serta perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi .
- Menyiapkan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan untuk bahan penyusunan materi penyuluhan .
- Mengadakan pelayanan teknik kegiatan Pengkajian/penelitian dan perakitan teknologi pertanian
- Melaksanakan pelayanan tata usaha Balai.

Rencana Strategis

Rencana Strategis BPTP Jatim adalah melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi bagi semua komoditas pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan teknologi yang bersifat terapan (siap pakai) dengan mempertimbangkan optimasi produksi serta pendapatan petani di *Propinsi Jawa Timur* yang mempunyai fungsi antara lain :

- Mengadakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- Melakukan penelitian dan pengkajian serta perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- Menyiapkan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan untuk bahan penyusunan materi penyuluhan.
- Mengadakan pelayanan teknik kegiatan Pengkajian/penelitian dan perakitan teknologi pertanian
- Melaksanakan pelayanan tata usaha Balai
- Membangun kemitraan dengan instansi terkait
- Memberikan saran dan anjuran sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pembangunan pertanian di daerah

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari



pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian



Jawa Timur yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%



- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:



- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.



(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	271.500.000,00	611.955.000,00
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	1.266.000,00	1.266.000,00
Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing2 kementerian negara/lembaga	109.100.000,00	82.722.000,00
Jumlah Pendapatan	381.866.000,00	695.943.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	13.901.566.000,00	13.901.566.000,00
Belanja Barang	16.809.000.000,00	22.454.300.000,00
Belanja Modal	7.050.000.000,00	13.139.845.000,00
Jumlah Belanja	37.760.566.000,00	49.901.566.000,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.699.035.810,00 atau mencapai 239,82% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp695.943.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	611.955.000,00	698.269.000,00	114,10
Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan		12.615.000,00	



Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya		37.500.500,00	
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	1.266.000,00	1.266.000,00	100,00
Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing2 kementerian negara/lembaga	82.722.000,00	129.740.000,00	156,83
Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah		54.141.198,00	
Pendapatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan		699.503.830,00	
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL		36.000.042,00	
Jumlah	695.943.000,00	1.669.035.810,00	239,82

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	%
Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	698.269.000,00	1.948.207.300,00	
Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	12.615.000,00	0,00	
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	37.500.500,00	0,00	
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	1.266.000,00	1.266.000,00	
Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing2 kementerian negara/lembaga	129.740.000,00	475.598.450,00	
Pendapatan jasa lainnya		10.525.000,00	
Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	54.141.198,00	95.385.212,00	
Pendapatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan	699.503.830,00	632.161.470,00	
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	36.000.042,00	9.940.084,00	



Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	%
Penerimaan kembali belanja barang TAYL		146.150.000,00	
Jumlah	1.669.035.810,00	3.319.233.516,00	198,87

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp40.593.240.854,00 atau 82,01% dari anggaran belanja sebesar Rp49.495.711.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		13.901.566.000,00	12.702.050.267,00	90,86
Belanja Barang		22.454.300.000,00	17.774.041.080,00	79,16
Belanja Modal		13.139.845.000,00	10.187.824.316,00	77,53
Total Belanja Kotor		49.495.711.000,00	40.663.915.663,00	82,01
Pengembalian Belanja			-70.674.809,00	
Total Belanja		49.495.711.000,00	40.593.240.854,00	82,01

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	2017			
	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian		49.495.711.000,00	40.663.915.663,00	82,01
Total Belanja Kotor			40.663.915.663,00	82,01
Pengembalian Belanja			-70.674.809,00	
Total Belanja		49.495.711.000,00	40.593.240.854,00	82,01

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	%
Belanja Pegawai	12.631.375.458,00	13.548.923.052,00	93,23
Belanja Barang	17.774.041.080,00	25.507.493.545,00	69,68



Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	%
Belanja Modal	10.187.824.316,00	6.650.865.700,00	153,18
Total Belanja	40.593.240.854,00	40.707.282.297,00	99,72

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.520.693.267,00	13.390.543.331,00	93,50
Belanja Lembur	181.357.000,00	198.800.000,00	91,23
Jumlah Belanja Kotor	12.702.050.267,00	13.589.343.331,00	93,47
Pengembalian Belanja Pegawai	-70.674.809,00	-40.420.279,00	174,85
Jumlah Belanja	12.631.375.458,00	13.548.923.052,00	93,23

B.2.2 BELANJA BARANG

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	915.175.000,00	782.490.000,00	116,96
Belanja Barang Non Operasional	4.118.994.900,00	3.833.483.600,00	107,45
Belanja Barang Persediaan	4.225.475.513,00	7.170.602.699,00	58,93
Belanja Jasa	816.933.535,00	1.654.552.173,00	49,37
Belanja Pemeliharaan	435.480.077,00	477.706.907,00	91,16
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.747.412.235,00	6.908.956.424,00	54,24
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	3.514.569.820,00	4.679.701.742,00	75,10
Jumlah Belanja Kotor	17.774.041.080,00	25.507.493.545,00	69,68
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	17.774.041.080,00	25.507.493.545,00	69,68



B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.837.138.898,00 dan Rp1.187.155.700,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 154,36% dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.837.138.898,00	1.187.155.700,00	154,36
Jumlah Belanja Kotor	1.837.138.898,00	1.187.155.700,00	154,36
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	
Jumlah Belanja	1.837.138.898,00	1.187.155.700,00	154,36

B.2.4 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.919.984.918,00 dan Rp5.463.710.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 144,96% dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.919.984.918,00	5.463.710.000,00	144,96
Jumlah Belanja Kotor	7.919.984.918,00	5.463.710.000,00	144,96
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	
Jumlah Belanja	7.919.984.918,00	5.463.710.000,00	144,96



C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp294.101.046,00 dan Rp445.102.020,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No	Nama	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	PNBP yang belum disetor	58.798.550,00	131.070.830,00
2	Denda keterlambatan pemb jalan,irigasi (CV.Kembang Kuning)		59.650.000,00
3	Jaminan yg blm cair krn wan prestasi (CV Kembang Kuning)		59.650.000,00
4	Kelebihan pembayaran (CV Kembang Kuning)		24.300.168,75
5	Kelebihan Pembayaran (CV Buton Jaya)	75.490.068,93	75.490.068,93
6	Kelebihan Pembayaran (PT Archicon Eka Rekadaya)		4.311.487,87
7	Kelebihan Pembayaran (PT Wida Mandiri)	6.872.676,60	6.872.676,60
8	Denda Keterlambatan (CV Arta Mulya Consultan)		2.436.500,00
9	Denda Keterlambatan (CV Hangtuh Persada)	39.620.050,00	39.620.050,00
10	Denda Keterlambatan (PT Archicon Eka Rekadaya)		4.892.332,75
11	Denda Keterlambatan (CV Pratama Dwi Karya)		688.746,37
12	Denda Keterlambatan (CV. Pundi Mandala)		5.760.00,00
13	Penggunaan Anggaran yang tidak benar (fiktif)	15.774.000,00	30.359.150,00
14	Perjalanan dinas	97.145.700,00	
15	Kelebihan pembayaran KP Karangploso	400.000,00	
Jumlah		294.101.046,00	445.102.020,00



C.1.2 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-2.225.510.000,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0.00	0.5%	0.00
Kurang Lancar	0.00	10%	0.00
Diragukan	0.00	50%	0.00
Macet	0.00	100%	0.00

C.1.3 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp9.142.366.212,00 dan Rp12.000.624.432,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	21.819.550,00	44.922.590,00
Bahan untuk Pemeliharaan	5.816.900,00	10.357.900,00
Suku Cadang	6.558.200,00	7.438.200,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	5.039.881.832,00	5.340.146.832,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.336.800.000,00	1.438.450.000,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.235.089.730,00	2.332.709.910,00



Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	977.365.000,00	1.524.700.000,00
Bahan Baku	339.755.000,00	1.215.724.000,00
Persediaan Lainnya	179.280.000,00	86.175.000,00
Jumlah	9.142.366.212,00	12.000.624.432,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp417.759.133.000,00 dan Rp417.759.133.000,00.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	275,00m2	RAYA KARANGPLOSO KM 4 Rt.36/08, KARANGPLOSO	88.000.000,00
2.	80.025,00m2	Raya Karangploso Km. 4 Rt.36/08, Karangploso	35.478.000.000,00
3.	5.710,00m2	gajah Mada Mojosari Mojokerto Rt.1, Mojosari	1.926.000.000,00
4.	52.070,00m2	Raya Gajah Mada Mojosari Mojokerto Rt.1, Mojosari	18.927.000.000,00
5.	37.440,00m2	Raya Gajah Mada Mojosari Mojokerto Rt.1, Mojosari	12.627.000.000,00
6.	147.350,00m2	Raya Mojosari Mojokerto Rt.1, Mojosari	49.693.000.000,00
7.	56.910,00m2	Raya Mojosari Mojokerto Rt.1, Mojosari	20.687.000.000,00
8.	10.350,00m2	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	10.686.365.000,00
9.	24.210,00m2	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	24.996.810.000,00
10.	1.865,00m2	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	1.925.615.000,00
11.	5.165,00m2	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	5.332.860.000,00
12.	360.200,00m2	LEMPUYUNG BANDAR Rt.1, TERBANGGI BESAR	4.325.783.000,00
13.	139.940,00m2	KEPEL Rt.1, BUGULKIDUL	26.459.227.000,00
14.	30.600,00m2	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	5.711.382.000,00
15.	30.370,00m2	BUGULKIDUL Rt.1, BUGULKIDUL	4.791.966.000,00
16.	193.490,00m2	BLANDONGAN Rt.1, BUGULKIDUL	36.584.221.000,00
17.	85.100,00m2	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	14.934.037.000,00



No	Luas	Lokasi	Nilai
18.	212.440,00m ²	BUGULKIDUL Rt.1, BUGULKIDU	37.280.691.000,00
19.	145.014,00m ²	BAKALAN Rt.1, BUGULKIDUL	37.763.458.000,00
20.	45.880,00m ²	BULAK Rt.1, KLANGENAN	1.389.935.000,00
21.	93.500,00m ²	JATIANOM Rt.1, SUSUKAN	2.307.446.000,00
22.	13.230,00m ²	JATIANOM Rt.1, SUSUKAN	310.801.000,00
23.	8.220,00m ²	ALASTUWO Rt.1, KEBAKKRAMAT	135.260.000,00
24.	2.740,00m ²	ALASTUWO Rt.1, KEBAKKRAMAT	42.723.000,00
25.	7.840,00m ²	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	7.937.614.000,00
26.	3.350,00m ²	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	3.352.233.000,00
27.	6.290,00m ²	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	6.368.316.000,00
28.	6.420,00m ²	PEKUNCEN Rt.1, BUGULKIDUL	6.499.934.000,00
29.	2.418,00m ²	JL PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	2.448.106.000,00
30.	10.060,00m ²	PEKUNCEN Rt.1, BUGULKIDUL	10.185.255.000,00
31.	3.745,00m ²	PEKUNCEN Rt.1, BUGULKIDUL	3.791.629.000,00
32.	8.112,00m ²	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	8.213.001.000,00
33.	4.065,00m ²	PAHLAWAN Rt.1, BUGULKIDUL	4.015.530.000,00
34.	2.440,00m ²	BUGULLOR Rt.1, BUGULKIDUL	2.441.627.000,00
35.	935,00m ²	BUGULLOR Rt.1, BUGULKIDUL	935.623.000,00
36.	437,00m ²	PURWOREJO Rt.1, PURWOREJO	334.523.000,00
37.	427,00m ²	PURWOREJO Rt.1, PURWOREJO	326.868.000,00
38.	421,00m ²	PURWOREJO Rt.1, PURWOREJO	322.275.000,00
39.	499,00m ²	PURWORJO Rt.1, PURWOREJO	381.984.000,00
40.	450,00m ²	PURWOREJO Rt.1, PURWOREJO	344.475.000,00
41.	342,00m ²	PURWOREJO Rt.1, PURWOREJO	224.613.000,00
42.	180,00m ²	PENGASINAN Rt.1, BEKASI TIMUR	224.613.000,00
43.	180,00m ²	PENGASINAN Rt.1, BEKASI TIMUR	224.613.000,00
44.	103.180,00m ²	SRAGI Rt.1, SRAGI	4.207.680.000,00
Jumlah			417.759.133.000,00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp38.115.846.767,00 dan Rp34.702.687.940,00.



C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp35.758.623.970,00 dan Rp23.959.469.052,00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.287.644.280,00 dan Rp1.856.943.780,00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp358.734.083,00 dan Rp358.734.083,00.

C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.359.030.000,00 dan Rp4.953.300.000,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-49.795.255.607,00 dan Rp-46.943.375.131,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	38.115.846.767,00	-32.140.068.567,00	5.975.778.200,00
2.	Gedung dan Bangunan	35.758.623.970,00	-16.820.216.874,00	18.938.407.096,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.287.644.280,00	-834.970.166,00	1.452.674.114,00
4.	Aset Tetap Lainnya	358.734.083,00	0,00	358.734.083,00
Akumulasi Penyusutan		76.520.849.100,00	-49.795.255.607,00	26.725.593.493,00



C.4.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-2.518.125,00 dan Rp-105.267.597,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	8.365.00,00	-2.518.125,00	5.846.875,00
2.	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		8.365.000,00	-2.518.125,00	5.846.875,00

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp30.011.492,00 dan Rp39.500.000,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	30.011.492,00	39.500.000,00
Jumlah	30.011.492,00	39.500.000,00

C.6 EKUITAS

C.6.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp455.383.543.443,00 dan Rp449.265.711.204,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset



dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp896.031.398,00 dan Rp2.530.981.962,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	698.269.200,00	1.948.207.300,00	64,15
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	12.615.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.266.000,00	1.266.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	129.740.000,00	475.598.450,00	72,72
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	10.525.000,00	100,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	54.141.198,00	95.385.212,00	43,23
Jumlah	896.031.398,00	2.530.981.962,00	64,59

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp12.631.375.458,00 dan Rp13.548.923.052,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	8.195.578.500,00	8.771.938.880,00	-6,57
Beban Pembulatan Gaji PNS	103.938,00	113.717,00	-8,59
Beban Tunj. Suami/istri PNS	545.303.610,00	594.935.832,00	-8,34



Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Tunj. Anak PNS	134.750.556,00	148.056.511,00	-8,98
Beban Tunj. Struktural PNS	7.740.000,00	7.020.000,00	10,25
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.773.335.000,00	1.994.835.000,00	-11,10
Beban Tunj. PPh PNS	225.758.774,00	341.812.312,00	-33,95
Beban Tunj. Beras PNS	378.322.080,00	408.448.800,00	-7,37
Beban Uang Makan PNS	971.911.000,00	860.492.000,00	12,94
Beban Tunjangan Umum PNS	217.215.000,00	222.470.000,00	-2,36
Beban Uang Lembur	181.357.000,00	198.800.000,00	-8,77
Jumlah	12.631.375.458,00	13.548.923.052,00	-72,86

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp142.019.483.354,00 dan Rp138.271.540.735,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan konsumsi	60.627.548.350,00	18.050.265.055,00	235,88
Beban Persediaan bahan baku	80.389.772.333,00	119.084.126.480,00	-32,40
Beban persediaan lainnya	1.002.162.671,00	1.137.149.200,00	6,19
Jumlah	142.019.483.354,00	138.271.540.735,00	209,67

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.801.678.260,00 dan Rp6.275.025.773,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016



Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Keperluan Perkantoran	656.500.000,00	587.890.000,00	11,67
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	164.550.000,00	166.200.000,00	-0,99
Beban Barang Operasional Lainnya	94.125.000,00	28.400.000,00	231,42
Beban Bahan	1.616.341.400,00	691.793.600,00	133,64
Beban Honor Output Kegiatan	50.550.000,00	33.200.000,00	52,25
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.452.103.500,00	3.108.490.000,00	-21,11
Beban Langganan Listrik	294.603.040,00	299.272.357,00	-1,56
Beban Langganan Telepon	23.492.862,00	22.359.169,00	5,07
Beban Langganan Air	3.983.000,00	8.760.300,00	-54,53
Beban Jasa Konsultan	0,00	18.000.000,00	-100,00
Beban Sewa	303.450.133,00	1.189.210.000,00	-71,12
Beban Jasa Profesi	107.250.000,00	118.200.000,00	-9,26
Beban Jasa Lainnya	34.729.025,00	3.250.347,00	968,47
Jumlah	5.801.678.260,00	6.275.025.773,00	1.143,95

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.046.122.597,00 dan Rp1.293.360.032,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182.351.650,00	167.240.000,00	9,03
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	253.128.427,00	310.466.907,00	-18,46
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	178.988.675,00	107.193.250,00	66,97
Beban Persediaan suku cadang	431.653.845,00	708.459.875,00	-39,07
Jumlah	1.046.122.597,00	1.293.360.032,00	18,47



D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.747.412.235,00 dan Rp6.908.956.424,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	3.455.477.435,00	6.264.869.124,00	-44,84
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	96.620.000,00	244.480.000,00	-60,47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67.450.000,00	68.100.000,00	-0,95
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	127.864.800,00	331.507.300,00	-61,42
Jumlah	3.747.412.235,00	6.908.956.424,00	-167,70

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.561.440.000,00 dan Rp5.960.082.085,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.355.565.000,00	3.253.173.000,00	-27,59
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.698.790,00	1.086.609.085,00	56,33
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	843.435.000,00	842.300.000,00	0,13
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	663.650.000,00	778.000.000,00	-14,69
Jumlah	5.561.440.000,00	5.960.082.085,00	14,18



D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.497.940.606,00 dan Rp7.985.080.118,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.933.879.737,00	2.193.398.803,00	-11,25
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	479.448.084,00	5.718.862.075,00	-91,40
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	58.726.806,00	51.564.306,00	13,89
Beban Penyusutan Irigasi	23.254.729,00	19.500.559,00	19,25
Beban Penyusutan Jaringan	990.000,00	990.000,00	0,00
Beban Amortisasi Paten	112.500,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Software	1.528.750,00	764.375,00	100,00
Jumlah	2.497.940.606,00	7.985.080.118,00	30,48

D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp379.423.178,00 dan Rp2.225.510,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang PNB	234.598.165,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	144.825.013,00	2.225.510,00	6.407



Jumlah	379.423.178,00	2.225.510,00	6.407
---------------	-----------------------	---------------------	--------------

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pelepasan Aset Non Lancar	-171.966.413,00	0,00	0,00
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Kegiatan Non Operasional Lainnya	138.177.765.259,00	133.305.916.175,00	4,01
Jumlah	138.005.798.846,00	133.305.916.175,00	-967,94



E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp449.265.711.204,00 dan Rp447.882.994.654,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-34.313.849.114,00 dan Rp-44.408.295.592,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-8,00 dan Rp3.154.724.369,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.2 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp40.431.681.361,00 dan Rp42.636.287.781,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	40.593.240.854,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.669.035.810,00
Transfer Masuk	1.507.476.317,00
Jumlah	40.431.681.361,00



E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp455.383.543.443,00 dan Rp449.265.711.204,00.



F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pengungkapan lainya Barang Milik Negara (BMN) yang dipergunakan dan dimanfaatkan oleh PT RPN / P3GI Pasuruan pada BPTP Jawa Timur

Barang Milik Negara (BMN) pada satker BPTP Jatim per 31 Desember 2017 senilai Rp.494.436.455.700,- Sebagian BMN tersebut saat ini dimanfaatkan dan dipergunakan oleh PT RPN (Pusat Penelitian dan Perkebunan Gula Indonesia Pasuruan).

No	Nama Aset	Nilai aset	Keterangan
1	Tanah	278.333.133.000	37 sertifikat luas 1.564.105 M2
2	Gedung dan bangunan	13.369.817.000	51 unit bamgunan
3	Peralatan dan Mesin	12.596.446.350	455 buah/unit barang
	Jumlah	304.299.396.350	

A. Tanah

Aset tanah pada satker BPTP Jatim per 31 Desember 2017 terdapat 44 bidang sertifikat senilai Rp. 417.759.133.000 sedangkan 37 persil/sertifikat tanah luas 1.564.105 M2 yang dimanfaatkan oleh P3GI senilai Rp. 278.333.133.000,- berlokasi di 6 kabupaten/kota.

No	Tanah	Luas	NUP	Lokasi	Nilai
A. Pasuruan Jawa Timur					
1	Tanah Kebun Percobaan	10.350	6	Kota Pasuruan, Jatim	10.686.365.000
2	Tanah Kebun Percobaan	24.210	7	Kota Pasuruan, Jatim	24.996.810.000
3	Tanah Kebun Percobaan	1.865	8	Kota Pasuruan, Jatim	1.925.615.000
4	Tanah Kebun Percobaan	5.165	9	Kota Pasuruan, Jatim	5.332.860.000
5	Tanah Kebun Percobaan	139.940	11	Kota Pasuruan, Jatim	26.459.227.000
6	Tanah Kebun Percobaan	30.600	12	Kota Pasuruan, Jatim	5.711.382.000
7	Tanah Kebun Percobaan	30.370	13	Kota Pasuruan, Jatim	5.329.573.000
8	Tanah Kebun Percobaan	193.490	14	Kota Pasuruan, Jatim	36.584.221.000
9	Tanah Kebun Percobaan	85.100	15	Kota Pasuruan, Jatim	14.934.037.000
10	Tanah Kebun Percobaan	212.440	16	Kota Pasuruan, Jatim	37.280.691.000
11	Tanah Kebun Percobaan	145.014	17	Kota Pasuruan, Jatim	37.763.458.000
12	Tanah Kebun	7.840	23	Kota Pasuruan, Jatim	7.937.614.000



	Percobaan					
13	Tanah Percobaan	Kebun	3.350	24	Kota Pasuruan, Jatim	3.352.233.000
14	Tanah Percobaan	Kebun	6.290	25	Kota Pasuruan, Jatim	6.368.316.000
15	Tanah Percobaan	Kebun	6.420	26	Kota Pasuruan, Jatim	6.499.934.000
16	Tanah Percobaan	Kebun	2.418	27	Kota Pasuruan, Jatim	2.448.106.000
17	Tanah Percobaan	Kebun	10.060	28	Kota Pasuruan, Jatim	10.185.255.000
18	Tanah Percobaan	Kebun	3.745	29	Kota Pasuruan, Jatim	3.791.629.000
19	Tanah Percobaan	Kebun	8.112	30	Kota Pasuruan, Jatim	8.213.001.000
20	Tanah Percobaan	Kebun	4.065	31	Kota Pasuruan, Jatim	4.015.530.000
21	Tanah Percobaan	Kebun	2.440	32	Kota Pasuruan, Jatim	2.441.627.000
22	Tanah Percobaan	Kebun	935	33	Kota Pasuruan, Jatim	935.623.000
23	Tanah Percobaan	Kebun	437	34	Kota Pasuruan, Jatim	334.523.000
24	Tanah Percobaan	Kebun	427	35	Kota Pasuruan, Jatim	326.868.000
25	Tanah Percobaan	Kebun	421	36	Kota Pasuruan, Jatim	322.275.000
26	Tanah Percobaan	Kebun	499	37	Kota Pasuruan, Jatim	381.984.000
27	Tanah Percobaan	Kebun	450	38	Kota Pasuruan, Jatim	344.475.000
28	Tanah Percobaan	Kebun	342	39	Kota Pasuruan, Jatim	261.047.000
B. Kab Lampung Tengah, Lampung						
29	Tanah Percobaan	Kebun	360.200	10	Kab Lampung Tengah, Lampung	4.325.783.000
C. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat						
30	Tanah Percobaan	Kebun	45.880	18	Kab. Cirebon, Jabar	1.389.935.000
31	Tanah Percobaan	Kebun	93.500	19	Kab. Cirebon, Jabar	2.307.446.000
32	Tanah Percobaan	Kebun	13.230	20	Kab. Cirebon, Jabar	310.801.000
D. Kab. Karanganyar, Jawa Tengah						
33	Tanah Percobaan	Kebun	8.220	21	Kab. Karanganyar, Jateng	135.260.000
34	Tanah Percobaan	Kebun	2.740	22	Kab. Karanganyar, Jateng	42.723.000
E. Kab. Bekasi, Jawa Barat						
35	Tanah Percobaan	Kebun	180	40	Kab. Bekasi, Jabar	224.613.000
36	Tanah Percobaan	Kebun	180	41	Kab. Bekasi, Jabar	224.613.000



F. Kab. Pekalongan, Jateng						
37	Tanah Kebun Percobaan	103.180	42	Kab. Pekalongan, Jateng		4.207.680.000

BPTP Jatim telah menatausahakan aset tanah pada tahun 2012 dengan nilai per m2 / Rp.1,00 dan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada tahun 2013 oleh KPKNL. Mutasi tambah kurang tanah tahun 2017 Rp.0,00.

B. Gedung dan Bangunan

Aset gedung dan bangunan BPTP Jawa Timur Per 31 Desember 2017 Rp. 35.758.623.970 dan sebagian gedung dan bangunan dipakai oleh P3GI Pasuruan sejumlah 51 unit / Rp. 13.369.817.000. Nilai tersebut adalah hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) tahun 2013 yang mencatat nilai gedung 1 unit Rp. 10.000.000,00. Bangunan tersebut terdiri dari bangunan gedung kantor, bangunan laboratorium, gedung perpustakaan, bangunan kantor lainnya, bangunan rumah negara, dan bangunan tersebut adalah bangunan Ex Nasionalisasi. Pada tahun 2017 tidak terdapat mutasi tambah kurang.

C. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin pada BPTP Jawa Timur per 31 desember 2017 sebesar Rp. 38.190.492.867 dan yang dimanfaatkan oleh P3GI Pasuruan sebanyak 455 unit / Rp. 12.596.446.350. BPTP Jawa Timur telah menatausahakan peralatan dan mesin yang dimanfaatkan oleh P3GI Pasuruan sejak tahun 2008, 2011 (perolehan aset sebelum tahun 2004) dan telah dilakukan inventarisasi pada tahun 2011, sedangkan barang rusak telah dilakukan penghapusan pada tahun 2012. Pada tahun berjalan per 31 desember 2017 tidak ada mutasi tambah kurang. Peralatan dan mesin tersebut terdiri dari 5 unit kendaraan roda empat, 2 unit sepeda motor, 4 unit traktor roda empat, peralatan kantor, sarana prasarana, alat pengolah data, peralatan laboratorium dan alat rekayasa. Atas permasalahan pemanfaatan dan penggunaan BMN BPTP Jatim oleh PT RPN tersebut telah dikordinasikan dengan Badan Ltbang Pertanian guna mendapatkan penyelesaian.

Permasalahan tersebut telah ditangani oleh Menteri Kordinator Bidang Perekonomian bahwa status kelembagaan PT RPN akan diubah menjadi Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III yang merupakan holding BUMN Perkebunan dan BMN Kementerian Pertanian yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan oleh PT RPN akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP). Badan litbang pertanian telah memerintahkan kepada satker yang mencatat BMN yang dipergunakan PT. RPN untuk melakukan koordinasi dengan PT RPN guna melakukan inventarisasi BMN yang sedang diusulkan sebagai PMPP.

Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai,



Chendy Tafakresnanto, MP
NIP. 19611222 199003 1001